

Perkembangan Infrastruktur Pasca Pemekaran Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Muhammad Raihatul Jannah¹, Bagus Ramadhan²

¹Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas AMIKOM
Yogyakarta

²Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas AMIKOM
Yogyakarta

Korespondensi Penulis: ¹muhammad.jannah@students.amikom.ac.id, ²bagusramadhan@amikom.ac.id

ABSTRAK

Desa Teluk Paman Timur mengalami pemekaran wilayah sehingga pembangunan infrastruktur juga mengalami perkembangan dari segi jumlah dan jenisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan infrastruktur Desa Teluk Paman Timur pasca pemekaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur tersebut. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan deduktif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengetahui perkembangan infrastruktur pada suatu desa dikarenakan pembangunan infrastruktur pada desa sudah mempunyai acuan atau peraturan pembangunan yang mengikat. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informasi diperoleh dari 10 informan. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sudah menunjukkan adanya perkembangan setiap tahunnya. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut terdapat kekurangan berupa bidang-bidang yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu bidang lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini ditemukan penyebabnya antara lain faktor tatakelola pemerintah, partisipasi masyarakat, sumber daya finansial, kualitas sumber daya manusia dan masalah teknis lapangan.

Kata kunci: pemekaran, perkembangan, infrastruktur

ABSTRACT

The expansion of Teluk Paman Timur Village has resulted in the development of infrastructure in terms of quantity and type. This study aims to determine the development of infrastructure in Teluk Paman Timur Village after the expansion and the factors that influence the development of infrastructure. The research method used is a qualitative deductive approach. This method is used to determine the development of infrastructure in a village because there are existing binding regulations and guidelines for infrastructure development. Data were collected using interviews, observation and documentation. Information was obtained from 10 informants. The data analysis was conducted qualitatively. The results of the study showed that infrastructure development has shown progress every year. However, there were shortcomings in infrastructure development in the form of fields that can improve the welfare of the community, namely the environmental, health and education sectors. These shortcomings were found to be attributed to factors such as government governance, community participation, financial resources, quality of human resources and technical problems in the field.

Keywords: expansion, development, infrastructure.

Informasi Artikel:

Diterima: April 2023 Direvisi: Mei 2023 Diterbitkan: Juni 2023

PENDAHULUAN

Dalam tatanan filosofis, pemekaran daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, hal ini pun berkaitan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Dalam Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Juga Penggabungan Daerah. Alasan lain yang disampaikan yaitu pemekaran yang terjadi akan mengembangkan demokrasi lokal yang terjadi melalui pembagian kekuasaan pada tingkatan lebih kecil. Pembahasan ini mencerminkan bahwa alasan utama yang menjadikan daerah dimekarkan terkait dengan adanya alasan pemerataan pembangunan dan juga perekonomian.

Berbicara pemekaran wilayah dalam skala lebih kecil, desa juga termasuk wilayah yang bisa dimekarkan. Pemekaran desa merupakan suatu proses pembagian, pemecahan dan juga penggabungan wilayah menjadi satu atau lebih atas dasar prakarsa masyarakat untuk memperhatikan adat istiadat atau asal-usul maupun sosial

budaya masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, tujuan dari pemekaran desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan, mempercepat pembangunan, membangkitkan perekonomian dan mengatasi kesenjangan sosial. dengan adanya pemekaran desa diharapkan bisa menciptakan kemandirian ataupun perkembangan suatu daerah.

Pemerintah Indonesia pada saat ini mengembangkan arah strategis kebijakan pembangunan suatu daerah berbasis desa. Yang mana desa merupakan institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat maupun hukumnya sendiri serta relatif mandiri dan hal ini ditunjukkan dengan adanya tingkatan keragaman desa yang tinggi (Widjaja, 2012). Hal ini juga menjadi sebagai wujud komitmen pemerintahan indonesia yang tertuang pada visi dan misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan jugadesa dalam kerangka Negara kesatuan. Adapun Tujuannya untuk mewujudkan

kemandirian dalam masyarakat dan juga diharapkan terbentuknya desa-desa mandiri dan berkelanjutan. Adapun Realisasi dari hal ini dibuktikan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disebut juga Undang-Undang Desa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, semakin mempertegas posisi desa di dalam pembangunan nasional. didalam Undang-Undang Desa terdapat pengaturan dan pedoman tentang materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa serta Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa serta Aset Desa, Pembangunan Desa dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, dan juga Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang desa juga mengatur

dengan porsi khusus yang hanya berlaku bagi Desa Adat. Bila diperhatikan, Undang-Undang Desa tidak hanya memberi kepastian hukum bagi Desa administratif, tetapi juga memberi tempat khusus bagi desa adat. Hal Ini menjadi penting karena bisa sekaligus menghilangkan ketimpangan antara hukum negara dan hukum adat.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana atau juga infrastruktur pada desa, pemerintahan desa telah dibekali dana dari pemerintah pusat yaitu berupa dana desa. Dalam pembangunan sarana dan prasarana, idealnya desa harus memiliki infrastruktur secara menyeluruh untuk kelangsungan menjalankan dan membuat desa supaya maju dan juga tentunya membuat kebutuhan masyarakat dibidang sarana prasaranaterpenuhi.

Desa Teluk Paman Timur adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Provinsi

Riau. Pada tahun 2007 Desa Teluk Paman Timur mengalami pemekaran dari Desa Teluk Paman. Permasalahan yang terjadi di Desa Teluk Paman Timur cukup banyak sebelum terjadinya pemekaran. Terutama di bidang infrastruktur desa, wilayah Desa Teluk Paman Timur kurang mendapat perhatian dari pemerintahan Desa Teluk Paman. Perhatian yang kurang dari pemerintahan desa membuat masyarakat dan tokoh adat Desa Teluk Paman Timur mengadakan musyawarah membahas untuk pemisahan wilayah desa. Sehingga pada tahun 2007 masyarakat Desa Teluk Paman dan Desa Teluk Paman Timur menyepakati untuk berpisah.

Mengingat pemekaran Desa Teluk Paman Timur sudah berjalan selama 15 tahun, dan bantuan dana dari pusat berupa dana desa setiap tahunnya diberikan, seharusnya perkembangan infrastruktur pada Desa Teluk Paman Timur sudah signifikan. Namun dalam kenyataannya, perkembangan infrastruktur di Desa Teluk Paman Timur belum merata secara

keseluruhan. Tentunya hal ini sebagai sebuah pertanyaan bagaimana perkembangan infrastruktur di Desa Teluk Paman Timur yang sudah berdiri dari 2007 dan faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur tersebut.

Pemekaran Desa

Menurut Hasibuan (1995), *“Pemekaran Desa adalah suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan dalam suatu daerah baru”*. Pemekaran Desa juga dapat diartikan sebagai pembentukan daerah otonom baru dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pemekaran desa diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disebut juga Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa menyebutkan bahwa "Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa dan Pembentukan desa dilakukan melalui Desa Persiapan".

Tujuan dari Pemekaran wilayah adalah kesejahteraan masyarakat yang didapati sebelum terjadinya pemekaran. Pemekaran Desa dapat diharapkan mengurangi berbagai permasalahan yang ada salah satunya adalah di bidang pembangunan infrastruktur. Adapun proses pengelolaan infrastruktur antara lain seperti Perencanaan dan penetapan program (planning and programming), Perancangan (design); Konstruksi (pembangunan), Operasi dan pemeliharaan serta Pemantauan dan evaluasi. Sementara sumber daya infrastruktur yang biasa disebut dengan 5M Yaitu man (manusia); Materials (bahan) Machines

(peralatan/mesin); Methods (cara kerja/metode) serta Money (modal/kapital).

Demi keberlangsungan roda pemerintahan desa dan juga kelancaran kegiatan masyarakat desa, maka diperlukan pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa sebagaimana dijelaskan dalam bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018, untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung kepada kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang dimaksud adalah meliputi :1.Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman. penjabaran mengenai hal ini. meliputi :a) jaringan air minum.b)drainase dan selokan.c)sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah, d)sumur resapan,

e).jaringan pengelolaan air limbah domestic skala permukiman, f).alat pemadam api ringan, g).pompa kebakaran portable, h).penerangan lingkungan sekitar pemukiman.i).sarana prasarana lingkungan permukiman lainnya.

2.Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi. Adapun penjabaran mengenai hal ini adalah meliputi :a).Jalan permukiman, b).Jalan poros kelurahan.c).Sarana prasarana transportasi lainnya. 3.Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan. Adapun penjabaran mengenai hal ini adalah meliputi: Mandi, kakus untuk umum/komunal. Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu. Sarana prasarana kesehatan lainnya. 4.Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan. Adapun penjabaran mengenai hal ini adalah meliputi

:1).Taman bacaan masyarakat, 2).Bangunan pendidikan anak usia dini. 3).Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini.4). Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Berbicara tentang pembangunan pedesaan, selama ini terlalu terikat dengan proyek pembangunan atau pembangunan pedesaan berskala besar. Padahal sebenarnya pembangunan desa tidak hanya sebatas pembangunan skala “proyek”, melainkan pembangunan dalam skala yang lebih besar atau lebih besar. Pembangunan di desa dapat berbeda dengan proses pembangunan yang dilaksanakan di wilayah desa, dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material, SDM) yang diperoleh negara (pusat dan daerah). Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan pembangunan desa. Kemudian di era

reformasi peristilahan terkait pembangunan desa lebih menonjol “pemberdayaan masyarakat desa (PMD)”.

Faktor Faktor Pembangunan

Infrastruktur

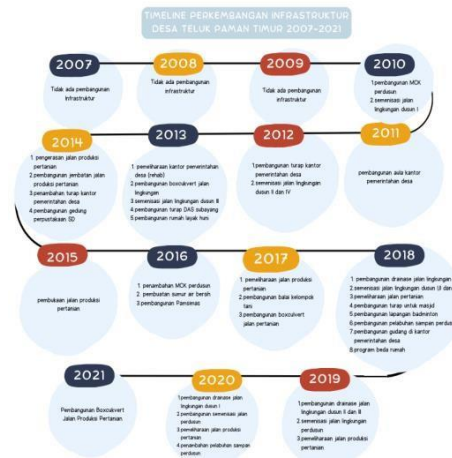
Menurut Zafar Iqbal dan Areef Suleman (2010), ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan infrastruktur antara lain yaitu, kualitas sumber daya manusia, sumber daya finansial, masalah teknis, tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat. Kemudian menurut Andi Yusuf Katili, (2016) factor factor yang mempengaruhi pembangunan yaitu, faktor perencanaan kegiatan, faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam. Demikian halnya menurut Fathurrahman, Burhanudin, dan Hariati (2019) factor dalam pelaksanaan pembangunan yaitu, Faktor lingkungan, sumber daya manusia perencana, sistem yang digunakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterbatasan pendanaan. Kemudian menurut Mareine Warouw, Ricky Leonardus Rengkung, dan

Paulus Adrian Pangemanan (2015) yaitu, pengembangansumber daya alam, sumber daya manusia, aspek ekonomi, keberhasilan perencanaan, pendanaan. Menurut Dicky Siswanto Renggi Tay dan Sugeng Rusmiwari, (2019) yaitu, Tersedianya sumber daya alam, Tersedianya sumber daya manusia, Partisipasimasyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Paradigma deduktif adalah cara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik atau Secara informal disebut pendekatan dari atas kebawah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif didasari data deskriptif mengenai kata kata lisan maupun tertulis serta tingkah laku yang dapat diamati oleh peneliti. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu pertanyaan yang dibuat merupakan pedoman awal untuk dilakukan wawancara dan selanjutnya

wawancara di lakukan dengan mengikuti alur pembahasan yang terkait tentang permasalahannya. Wawancara dilakukan dengan teknik *snowball* sampling. Wawancara dilakukan kepada 10 Responden terdiri dari pemerintah desa Teluk Paman Timur, Tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah desa yang telah pensiun. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif penyesuaian indikator penelitian dengan data lapangan, penyajian data, dan menarik kesimpulan.



Sumber: Hasil Analisis, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Infrastruktur Desa Teluk Paman Timur Pasca Pemekaran

Untuk memudahkan memahami perkembangan infrastruktur pasca pemekaran Desa Teluk Paman Timur, penulis membuat infografis perkembangan infrastruktur Desa Teluk Paman Timur dari tahun 2007 – 2021:

Gambar 1. Infografis Perkembangan infrastruktur Desa Teluk Paman Timur Pasca Pemekaran

Dari Gambar 1. perkembangan pembangunan infrastruktur dari tahun 2007 – 2021 diketahui bahwa infrastruktur Desa Teluk Paman Timur pasca pemekaran menunjukkan adanya peningkatan jumlah infrastruktur. terlihat adanya penambahan jumlah pada setiap tahunnya. Namun demikian pembangunan infrastruktur tersebut belum secara menyeluruh dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan atau desa dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan atau desa. Terdapat beberapa

pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana di beberapa bidang yaitu : pertama, untuk bidang lingkungan permukiman, pembangunan infrastruktur yang belum dilakukan yaitu a).jaringan air minum, b).sarana pengumpulan dan pengolahan sampah, c).jaringan pengelolaan air limbah, d).alat pemadam kebakaran, e).Lampu penerangan jalan lingkungan. Selanjutnya bidang kedua yaitu bidang kesehatan kegiatan pembangunan yang belum terbangun yaitu :Poskesdes. Bidang ke tiga , untuk bidang pendidikan kegiatan pembangunan yang belum dilakukan yaitu taman bacaan masyarakat

Faktor Yang Mempengaruhi

Pembangunan Infrastuktur Desa Teluk Paman Timur Pasca Pemekaran

Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur di Desa Teluk Paman Timur adalah : 1).Partisipasi Masyarakat. Masyarakat Desa Teluk Paman Timur menanggapi baik upaya pembangunan infrastruktur di Desa Teluk

Paman Timur. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan yang telah dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan , monitoring dan evaluasi. 2).Tata Kelola Pemerintah, upaya pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Pemerintahan Desa Teluk Paman Timur selalu berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan setiap perancangan pembangunan infrastruktur, Pemerintah desa senantiasa melakukan kegiatan Musrenbangdes atau musyawarah rencana pembangunan desa. 3). Kualitas Sumber Daya Manusia , kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas sangat mempengaruhi pembangunan pada desa. Sebagaimana yang terjadi di wilayah wilayah lain yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi menjadikan wilayahnya maju di segala bidang . Kualitas sumberdaya manusia di Desa Teluk Paman Timur masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat

pendidikan penduduk di Desa Teluk Paman Timur. 3). Sumber Daya Finansial, Keterbatasan anggaran pembangunan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan. Dana desa tidak terfokus untuk pembangunan infrastruktur saja, melainkan dana desa juga di peruntukkan pemberdayaan masyarakat. Selain itu jumlah kebutuhan anggaran pembiayaan pembangunan infrastruktur tinggi, sehingga berakibat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh tidak bisa terealisasi dengan semestinya karena anggaran pembangunan sudah habis pada satu infrastruktur saja. 4).Masalah Teknis Lapangan, masalah teknis lahan yang terjadi yaitu perihal pembebasan lahan. Lahan yang dimiliki warga terkena pembangunan infrastruktur menuntut ganti rugi yang melebihi standar dana yang dianggarkan. Hal ini menjadi salah satu kendala pembangunan infrastruktur Desa Teluk Paman Timur. Permintaan ganti rugi yang tinggi oleh warga menjadi

salah satu permasalahan yang tidak berujung sehingga pembangunan infrastruktur terkadang gagal dilaksanakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa perkembangan infrastruktur Desa Teluk Paman Timur dari tahun 2007 hingga 2021 mengalami perkembangan baik jumlah maupun jenisnya . Perkembangan infrastruktur cukup signifikan dibuktikan dengan pembangunan dari setiap periode pelaksanaan pembangunan. Bidang infrastruktur yaitu dibidang kesehatan, lingkungan permukiman, pendidikan dan transportasi. Namun masih terdapat beberapa infrastruktur yang belum tersedia seperti hal nya di jelaskan pada Permendagri No 130 Tahun 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan infrastruktur di Desa Teluk Paman Timur. Yaitu berupa faktor tata kelola pemerintah dan partisipasi

masyarakat, faktor kualitas sumber daya manusia, faktor sumber daya finansial dan faktor masalah teknis lapangan. Untuk itu Pemerintahan Desa Teluk Paman Timur diharapkan lebih memperhatikan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa Teluk Paman Timur bersama masyarakat diharapkan saling bekerja sama dalam segala kegiatan pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Nur Noviana. 2020. *“Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan (Studi Di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)”*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Novita, Lilya. 2020. *“Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Study pada Pemekaran Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mubarokah, Nur Lailatul. 2018. *“Analisis Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)”*. Jurnal Tidak Terbit.
- Bustami, H. Edwin. 2018. “Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro”. *Jurnal Administrasi Nusantara*, Vol. 1, Nomor 2
- Sundari, Wulan. 2020. “Analisis Pemekaran Di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati VII Terhadap Pembangunan Infrastruktur”. *Jurnal Administrasi Nusantara*, Vol. 2, Nomor 10
- Panambunan, Grace. A.A.G. 2018. “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Infrastruktur Desa Pakuure Dua Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa”. *Agrisioekonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 14 Nomor 1, Hal : 231 -240*
- Sapi’i, Imam. 2018. “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, (Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)”. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, I (1):1-7
- Erwin Ndakularak, dkk. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)*
- Laurenzia Karinda. 2015. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kinerja Hukum Tua Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Kiawa Satu Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa). *Jurnal Nasional Ilmu Pemerintahan*.
- Sugiono, 2017. *Metode Penelitian*

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

Sugiono. 2003. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V.* Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.

Undang-Undang Republik
Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014,
Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 114
Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 1
Tahun 2017, Tentang Penataan Desa.